



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG KELAS
JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (PELAKSANA) PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Kedua Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara (Pelaksana) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 Tentang Penataan Sisten Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2244 Tahun 2024 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;

2. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 267/SDM.09-SD/5272/4/2025 Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Kelas Jabatan Struktural dan Pelaksana di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL (PELAKSANA) NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Merubah dan menetapkan lampiran Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara (Pelaksana) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku Surut Sejak tanggal 2 Juni 2025.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 7 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



MARS ANSORI WIJAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG KELAS JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA (PELAKSANA) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025.

NO	NAMA PEGAWAI	NIP / NI. PPPK	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	AMIRULLAH, ST.	19770415 201406 1 004	7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Penata (III/c)	PNS PUSAT	Tetap

NO	NAMA PEGAWAI	NIP / NI. PPPK	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	AWALUDDIN, A.Md.	19740413 200701 1 003	7	Penelaah Teknis Kebijakan pada sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penata (III/c)	PNS PUSAT	Tetap
3.	ELI IDAWATI, A.Md.	19830323 201212 2 001	7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Penata Muda (III/a)	PNS PUSAT	Tetap
4.	NURJAYA.	19730605 200701 1 043	7	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.	Penata Muda (III/a)	PNS PUSAT	Tetap

NO	NAMA PEGAWAI	NIP / NI. PPPK	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	SURYANTO	19680809 200701 1 005	7	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Penata Muda (III/a)	PNS PUSAT	Tetap
6,	EDI KURNIAWAN	19830626 201406 1 002	7	Penata Kelola Sistem dan teknologi Informasi Pada Sub.Keuangan, Umum dan Logistik.	Penata Muda (III/a)	PNS PUSAT	Tetap
7.	NASRULLAH	19771130 200801 1 007	6	Pengolah Data dan Informasi pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Pengatur Tk.I (II/d)	PNS PUSAT	Tetap
8.	SUTONO.	19740104 200910 1 001	6	Pengelola Layanan Operasional pada Sub.Bagian keuangan dan Umum dan Logistik.	Pengatur Tk.I (II/d)	PNS PUSAT	Tetap
9.	MUHAMMAD KHALIF ARDI, S.H.	199104082025061001	7	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhumas.	Penata Muda (III/a)	CPNS	Baru ditetapkan

NO	NAMA PEGAWAI	NIP / NI. PPPK	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	RISKY WULAN RAMADHANI, S.H.	200111302025062003	7	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Parhumas.	Penata Muda (III/a)	CPNS	Baru ditetapkan
11.	MUHAMMAD ZAINUL MUBAROK, S.Kom.	199502112025061003	7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Penata Muda (III/a)	CPNS	Baru ditetapkan
12.	YUDHA ADITYA PRATAMA, S.Kom.	200005092025061008	7	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.	Penata Muda (III/a)	CPNS	Baru ditetapkan
13.	ISWATI RAHMATIA, S.Sos.	198306112024212015	8	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	PPPK	Tetap
14.	MUHAMMAD NATSIR, S.H.	198603102024211009	8	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	PPPK	Tetap

NO	NAMA PEGAWAI	NIP / NI. PPPK	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	ALIF ADIL MUKMIN, S.H.	199405142024211016	8	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	PPPK	Tetap
16.	FADLIN, S.Kom.	199305082024211011	8	Ahli Pertama-Pranata Komputer	IX	PPPK	Tetap
17.	MUJIBURRAHMAN	198606142024211012	8	Ahli Pertama-Pranata Komputer	IX	PPPK	Tetap
18.	SUHADA, S.Sos.	198805032024212037	8	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	PPPK	Tetap
19.	WAHYU, S.Pd.	199805062024212043	8	Ahli Pertama-Penata Kelola Pemilu	IX	PPPK	Tetap
20.	DIDI DARMADI, A.Md.	198106092024211006	6	Terampil Arsiparis	VII	PPPK	Tetap
21.	AHMAD RAFIUDIN, A.Md.	198108182025211012	6	Pengelola Layanan Operasional	VII	PPPK	Baru ditetapkan
22.	MAHYUDIN	197710062025211010	5	Operator Layanan Operasional	V	PPPK	Baru ditetapkan

NO	NAMA PEGAWAI	NIP / NI. PPPK	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	PANGKAT GOLONGAN	JENIS PEGAWAI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
23.	YUYUN HARYADIN	198404222025211019	5	Pengadministrasi Perkantoran	V	PPPK	Baru ditetapkan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



MARS ANSORI WIJAYA